

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ali, Zainuddin H. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Arifin, Saru. (2014) *Hukum: Perbatasan Darat Antarnegara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Brilmayer, Lea, dan Natalie Klein. "Land and Sea: Two Sovereignty Regimes In Search of a Common Denominator." *Yale Law School Faculty Scholarship Series* (2001): Paper 2523.
- Darmawan, Eki, Mahadiansar, dan Oksep Adhayanto. (2021) *Dinamika Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Laut di Indonesia*. Tanjungpinang: Laboratorium Komunikasi & Sosial Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Evendia, Malicia, dan Indah Satria. *Hukum Otonomi Daerah*. (2021) Yogyakarta: Suluh Media.
- Fathurrahman, dan Dewi Nurvianti. *Wilayah Perbatasan Negara (Perpektif Hukum Tata Negara & Hukum Internasional)*. (2022). Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Hasyim, Abdul wahid, Aris Subagiyo. *Pengelolaan Perbatasan*. (2017) Malang; UB Media
- H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (2013) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadiwijoyo, Sakti Suryo. *Batas Wilayah Negara Indonesia Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*. (2009). Yogyakarta: Gava Media.
- Hafel, Muhlis. *Menggugat Negara Maritim : Konflik Kebijakan di Wilayah Perbatasan*. (2020). Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Harto, Zulkifli. *Batam : Eksistensi Kawasan*. (2012). Tanjungpinang: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

- Haspara, Fathir pandoyo. *Menyigi Batas Negeri Faktor-faktor yang Mempengaruhi Koordinasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Indonesia*. (2021). Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Kusriyah, Sri. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (2019). Semarang: Unisulla Press.
- Lutfi, Muta'ali, Marwasta Djaka, dan Christanto Joko. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*. (2014). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. *Pengantar Hukum Internasional*, (2021). Klaten: Penerbit Lekeisha.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (2020). Mataram: Mataram University Press, n.d.
- Nazaki, *Buku Ajar Pemerintahan Daerah*. (2016). Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*. (2009). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Pinther Miklos, William A, Robertson, Maxim Shoshany, Buddhi N.Sherestha,, Halm Srebo, *International Boundary Making*. (2013). Denmark: The International Federation of Surveyours (FIG).
- Rachman, Maman. *5 pendekatan Penelitian*. (2015). Magnum Pustaka.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. (2018). Jakarta: Sinar Grafika.
- Robert J Holton, *1 Globalization at the nation state*. (1998). UK: Macmillan, London.
- Rusmiyati, Mesy Faridah, Alma'arif, dan Afri Nooraini. *Manajemen Perbatasan Daerah*. (2022). CV Cendikia Perss.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (1986). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (2008). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunyowati, Dina, dan Enny Narwati. *Buku Ajar Hukum Laut*. (2013). Surabaya: Airlangga University Press.
- Sutisna, Sobar, Sobar Lukita, dan Sumaryo. *Boundary Making Theory dan*

Pengelolaan Perbatasan di Indonesia. Makalah Workshop Pengelolaan Wilayah Perbatasan. (2008). Yogyakarta.

Sutrisno, Adi, Said Usman, Ety Wahyuni, Elly Jumiati, Nindya Adiasti, Rahyana Jafar, dan Desy Irsalina. *Pengantar Sosial Ekonomi dan Budaya Kawasan Perbatasan.* (2020). Malang: Inteligencia Media.

Waluyu, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* (2008). Jakarta: Sinar Grafika.

Kajian Optimalisasi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim RI-RDTL Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI. (2007). Jakarta: Direktorat Jendral Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan.

Jurnal

Abikusna, R Agus. (2019). “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah.” *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi XIII*, 1–15.

Damayanthi, Made Risma Ni, Komang Febriyanti Dantes, Ngurah Ni Ardhya, dan Jodi.M Setianto. (2022). “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Perbatasan Menurut Perpektif Hukum Internasional.” *Jurnal Pacta Sund Servanda*, 3(2)

Dhesy A. Kase. (2020). “Wilayah Perbatasan Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional”. *Jurnal Proyuris*. 2(1)

Eka Purna Yudha dan Resa Ana Dina. (2020). “Pengembangan Potensi Wilayah Kawasan Perbatasan Negara Indonesia (Studi Kasus: Ranai-Natuna) Regional Potential Development Of The Indonesian Country Border Area (Case Study Of Ranai-Natuna).” *Tata Loka*, 366–378.

Evi Purwanti. (2019). “Kedaulatan Negara Dalam Konteks Hukum Laut Internasional”, *Jurnal HLI*.

Hadrian, Eko. (2020). “Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan.” *Jurnal Kemunting*. 1(2). 183–203.

Hendrayady, Agus. (2019) “Membangun Wilayah Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau (Mencari Solusi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau-Pulau Terdepan).” *KEMUDI: Jurnal Ilmu*

- Pemerintahan*. 4(1). 34–49.
- Hendrayady, Agus. (2018). “Strategi pembangunan wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 6(1). 44–51.
- Kennedy, Johnson Sariguna Posma, Jhosepine Suzanna Tobing. L, L Rutman Toruan, Emma Tampubolon, Adolf Heatubun, dan Anton Nomleni. (2018). “Kajian Normatif: Pengelolaan Perbatasan dan Kelembagaan Pusat-Daerah Berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara.” *IKRAITH EKONOMIKA*. 1
- Mangu, Gede Sudika. (2019). “Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. 4(2). 167–174.
- Mirza, dan Siti Aisyah. (2020) “Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau.” *JIPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*. 1(1). 14–34.
- Nasution, Mimin Sundari. (2019). “Potensi Wilayah Perbatasan Strategis.” *Jurnal Kebijakan Publik*. 9(2). 117.
- Pratiwi, Dian Khoreanita. (2020). “Keamanan Laut Wilayah Perbatasan Indonesia Sebagai Bentuk Penjagaan Kedaulatan Negara.” *Supremasi Jurnal Hukum*. 3(1). 32–57.
- Puteri, Dwinta Nurul. (2021). “Peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perbatasan Indonesia (The Role Of The National Border Management Authority Republic Of Indonesia In Supervising Indonesia’s Borders).” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. 5(1).
- Putu Wahyu widiartana. (2021). “Jurnal Hukum & Pembangunan Kedudukan dan Kewenangan : Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Indonesia”. 51(1)
- Rahayu, dan Junior. (2021). “Optimalisasi Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus: Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau). .” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* . 9(2). 64–78.
- Razma, Okky, dan Pery Rehendra Sucipta. (2018). “Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi

Kepulauan Riau).” *Jurnal Selat*. 6(1). 37–60.

Sudiar, Sonny. (2019). “Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara.” *Jurnal Hubungan Internasional*. 7(2).

Peraturan-Peraturan

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2008. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lembar Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.

Peraturan Pemerintah

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021. Peraturan Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Pengelola Perbatasan.

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024

Peraturan Gubernur

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Walikota

Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Peraturan Internasional

UNCLOS 1982

Montevideo Convention 1993

Internet

Badan Pengelolaan Perbatasan dan Pertanahan. *Selayang Pandang*. <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/pertanahan/buku-referensi/index.html>.

BPK RI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Kota Batam*. <https://kepri.bpk.go.id/pemerintah-kota-batam/>.

Detikedu. *10 Provinsi dengan Jumlah Terbanyak dan Sedikit di Indonesia, Ada Daerah Mu?*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6997121/10-provinsi-dengan-jumlah-pulau-terbanyak-dan-sedikit-di-indonesia-ada-daerahmu>.

JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, *Perpres 118/2022: Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024*. <https://jdih.maritim.go.id/perpres-1182022-rencana-induk-pengelolaan-batas-wilayah-negara-dan-kawasan-perbatasan-tahun-2020-2024#:~:text=Secara%20garis%20besar%2C%20Perpres%20118,Wilayah%20Negara%20dan%20Kawasan%20Perbatasan>.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Mengelola Wilayah Perbatasan NKRI*, <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan->

geologi/mengelola-wilayah-perbatasan-nkri.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Rapat Koordinasi Pemanfaatan Pulau Nipah*. <https://www.kemhan.go.id/baranahan/2018/03/14/rapat-koordinasi-pemanfaatan-pulau-nipah.html>.

Kompas.com, *Masalah-Masalah Di Wilayah Perbatasan Indonesia dan Upaya Mengatasinya*. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/06/00050061/masalah-masalah-di-wilayah-perbatasan-indonesia-dan-upaya-mengatasinya>.

Perkim.id. *PKP Kepulauan Riau*. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-kepulauan-riau/#:~:text=Kepulauan%20Riau%20merupakan%20sebuah%20provinsi,%E2%80%93%20110%20000'%20Bujur%20Timur>.

PPID, *Daftar Wilayah di Provinsi Kepri yang Masuk Dalam Perpres RTR KPN No 43/2020*, <http://ppid.bnpp.go.id/news/newsdetail/874/home>.

PPID Kepri, *Profil Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri*, <https://ppid.kepriprov.go.id/daftar-informasi/lihat/2132>

